**STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN VOKASI BERBASIS PENDIDIKAN KARAKTER PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN SERANG**

**Sunariah**

**NPM. 179020002**

Pasca Sarjana Universitas Pasundan Bandung

sunariah@gmail.com

**Ummu Salamah**

**Iwan Satibi**

**Abstrak**

Penelitian ini fokus dan bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis ketidakefektifan implementasi kebijakan pengembangan pendidikan vokasi berbasis pendidikan karakter pada Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Serang dengan menggunakan teori MSN-Approach yang dikemukakan oleh Kadji (2008), yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan melalui tiga pendekatan yakni pendekatan Mentality, System dan Network.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Serang dengan unit analisis adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Kantor Cabang Dinas Pendidikan wilayah Serang dan Cilegon, serta Sekolah Menengah Kejuruan Negeri pilihan di Kabupaten Serang.

Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan pengembangan pendidikan vokasi berbasis pendidikan karakter pada Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Serang belum efektif karena aspek mental dan sistem yang masih kurang maksimal. Dalam penelitian ini juga ditemukan aspek lain sebagai kritik terhadap teori MSN-Approach yakni aspek isi kebijakan sebagai novelty atau kebaruan penelitian. Strategi implementasi kebijakan yang tepat untuk pengembangan pendidikan vokasi berbasis pendidikan karakter pada Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Serang ditemukan dengan menggunakan analisis SWOT, yakni strategi diversifikasi., yakni dengan mengukur potensi ancaman yang akan hadir dan meminimalisir kelemahan yang dimiliki.

*Kata Kunci :* Implementasi kebijakan, SMK, pendidikan karakter

A BST R AC T

This study focuses and aims to examine and analyze the ineffectiveness of implementing character

education-based vocational education development policies at Vocational High Schools in Serang

Regency using the MSN-Approach theory put forward by Kadji (2008), which determines the success

of policy implementation through three approaches, namely the Mentality approach. , Systems and

Networks.The research was conducted in Serang District with the units of analysis being the

Education and Culture Office of Banten Province, Branch Offices of the Serang and Cilegon

Education Offices, and selected State Vocational High Schools in Serang District. The results of the

study show that the implementation of character education-based vocational education development

policies at Vocational High Schools in Serang Regency has not been effective because the mental and

system aspects are still not optimal. This study also found another aspect as a critique of the MSNApproach theory, namely the aspect of policy content as a novelty or novelty of research. The right

policy implementation strategy for the development of character education-based vocational

education at Vocational High Schools in Serang Regency was found using a SWOT analysis, namely a

diversification strategy, namely by measuring the potential threats that will be present and minimizing

the weaknesses they have.

Keywords: Policy implementation, SMK, character education, SWOT

1. **PENDAHULUAN**

Konsep pembelajaran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dikategorikan sebagai Pendidikan vokasi, seperti halnya dengan pendidikan vokasi, sukses tidaknya peran pendidikan SMK dapat diukur dari keseimbangan dua tujuan, yaitu pengembangan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.(Slamet, 2009:189). Secara khusus pendidikan vokasi diselenggarakan untuk mengembangkan peserta didik agar memiliki pekerjaan keahlian terapan tertentu, sehingga dapat beradaptasi pada bidang pekerjaan tertentu dan dapat menciptakan peluang kerja. Dengan kata lain, sasarannya adalah lulusan yang siap bekerja dan dapat dengan mudah diserap oleh dunia usaha dan dunia industri.

Namun data empiris menunjukan, jumlah pengangguran di Indonesia masih menjadi masalah yang terus menghantui pembangunan nasional. Masalah tersebut merupakan gambaran kondisi pengangguran di daerah daerah seluruh Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik Nasional, pengangguran lulusan tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Diploma masih tertinggi di antara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 11, 13% pada Agustus 2021.

Tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun 2020 sampai dengan 2021 (Pebruari). Walaupun terjadi penurunan, namun tidak signifikan. Pada Tabel di atas juga diketahui bahwa pengangguran di Indonesia salah satunya disumbang terbesar (kedua setelah Kepri)oleh Provinsi Banten. Menurut data yang didapat dari Badan Pusat Statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten, menyumbang 8,98 % jumlah angka Pengangguran. berdasarkan wilayah kabupaten/kota, maka diketahui peringkat pertama diduduki oleh Kabupaten Serang, yaitu sebanyak 10,58%, Di susul dengan Kota Cilegon, 9,68 persen, Kabupaten Tangerang, 8, 91 persen, Kabupaten Pandeglang 8,71 persen, Kota Serang, 8,08 persen, Kabupaten Lebak, 8,05 persen, Kota Tangerang, 7,13 persen, dan Kota Tangerang Selatan, 4,79 persen. (BPS Provinsi Banten, November 2021).

Kabupaten Serang sebagai wilayah dengan jumlah Industri tinggi menjadi kantong pengangguran di Provinsi Banten, tabel di atas menunjukan Kabupaten Serang merupakan penyumbang 10,58% angka pengangguran dan merupakan tertinggi di Provinsi Banten.

Tingginya angka pengangguran di daerah daerah yang di dominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan, disebabkan banyak hal. Hasil pengamatan empirik yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional dalam penelitian Mariah & Sugandi (2013:2) menunjukan bahwa sebagian besar lulusan Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia, bukan saja kurang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi, namun juga kurang mampu mengembangkan diri dan karirnya di tempat bekerja.

Hasil observasi awal, peneliti mendeteksi faktor penyebab tidak berhasilnya pendidikan vokasi dalam mengantisipasi pengangguran di Indonesia. Kontribusi lulusan SMK terhadap jumlah pengangguran di Indonesia dan wilayah wilayah di dalamnya yang masih sangat tinggi salah satunya disebabkan oleh lebih rendahnya keahlian khusus atau soft skill lulusan SMK dibandingkan lulusan SMA. Menjadi suatu ironi, bahwa lulusan yag dituntut langsung memasuki dunia kerja justru memiliki soft skill rendah dan kurang tangguh dalam mengembangkan diri. Winangun (2017:77) mengemukakan untuk menghasilkan tenaga kerja lulusan SMK yang memiliki kompetensi soft skill dan hard skill harus ditempuh dengan tiga alternative jalur yaitu struktur kurikulum, pembelajaran yang produktif, serta didukung oleh guru/instruktur yang kreatif dan kompeten.

Penerapan pendidikan berbasis pendidikan karakter telah mulai dikembangkan di Indonesia. Salah satunya dilakukan oleh Sekolah Menengah Kejuruan, yang pada lulusannya sangat dibutuhkan kemampuan karakter yang akan sangat membantu dalam jenjang karier yang diharapkan langsung digeluti. Strategi ini diharapkan dapat menjadi solusi dan jalan keluar dalam meningkatkan kualitas peserta didik dari Sekolah Menengah Kejuruan sehingga dapat diserap dengan baik oleh dunia usaha dan dunia industri, yang pada gilirannya akan mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia.

Pendidikan karakter sangat penting bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (periode 20016 - 2019) Muhajir Efendi (2018) dalam Seminar Nasional Revitalisasi SMK di Surakarta 16 Mei 2020 yang di kutip dalam psmk.kemendikbud.go.id mengatakan, karakter yang penting untuk masuk di dunia kerja adalah pribadi yang tahan banting, peserta didik harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, juga tidak mudah menyerah atau putus asa.(psmk.kemendikbud.go.id, 2020)

Upaya pendidikan mental dan karakter siswa pada satuan pendidikan di Indonesia telah diatur dalam Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Secara tersirat dapat disimpukan bahwa pendidikan nasional berjutuan untuk membentuk sumber daya manusia unggul yang berilmu, cakap dan bertanggungjawab. (Bab II, Pasal 3). Upaya pendidikan mental siswa tersebut dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

**2. LANDASAN TEORI**

**Administrasi Publik**

Siagian (2012:13) mendefinisikan admintrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasrkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan Negara secara etimologis berasal bahasa Inggris “State” yang artinya dalam bahasa latin yaitu status yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat yang tegak dan tetap atau lebih sering disebut station yang berarti kedudukan.

Simon (1999:3) merumuskan definisi administrasi sebagai kegiatan kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan tujuan bersama. Gie (1993:9) mendefinisikan administrasi sebagai rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertrntu.

Berbagai definisi dari administrasi publik yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat di tarik kesimpulan, bahwa administrasi publik merupakan kegiatan penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh kelompok penyelenggara negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) di dukung oleh sumber daya manusia, waktu, alat, finansial dan metode yang terdiri dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada kontroling dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.

**Kebijakan Publik**

Lasswell dan Abraham seperti dikutip dalam Islamy (2003: 15-17) mengartikan kebijaksanaan sebagai “*a projected program of goals, values and practice”* yang artinya adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-niai dan praktek-praktek yang terarah. Sedangkan penjelasan lain mengenai kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang di usulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatankesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Nugroho (2003:51) kebijakan pemerintah atau kebijakan publik merupakan hasil interaksi intensif antara para aktor pembuat kebjakan berdasarkan pada fenomena yang harus dicarikan solusinya. Menurut pendapat subarsono kebijakan publik dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Keputusan Walikota/Bupati. Pengertian tersebut diperkuat oleh Dye dalam Dunn (2000:110) memiliki 3 elemen dalam pembentukannya yaitu kebijakan publik (public policy), pelaku kebijakan (policy stakeholders), dan lingkungan kebijakan (policy environment).

**Implementasi Kebijakan Publik**

Esensi utama dari implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2008: 196) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah-masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Van Meter dan Van Horn (1978) seperti dikutip oleh Wahab (2006:65) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan tindakan yang dilakukan oleh individu individu dan kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Merylee S. Grindle (1980:7) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh pejabat public dan administrasi, “

*“A breaft listing of those who might be involved in the implementation of particular program would include national level planer, national, regional and local politicians, economic elit groups, especially at the local level: receipient groups and beureaucratic implementators at middle and lower level”.*

Pernyataan di atas menunjukan bahwa pada setiap jenjang pemerintahan terlibat dan memiliki peran tersendiri dalam suatu kebijakan, lebih lanjut Grindle menegaskan:

*“in addition, because policy implementation in consider to depend on program outcomes, it is difficult to sparate the fate of polities from that of their constituent program… its success or failure can be evaluated in term of the capacity actually to deliver program as designed in turn, overall policy implementation can be evaluated by measuring programs outcomes against policy goals*”

Pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa dalam implementasi kebijakan, pelaksana kebijakan memegang peranan penting dalam keberhasilan implementasi sebuah kebijakan publik, dan bahwa keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh implementasinya yang dievaluasi dan diukur dari ketercapaian tujuan kebijakan yang ditentukan sebelumnya.

Dalam memahami implementasi kebijakan terdapat tiga pendekatan yang dikenal, yakni pendekatan *top down,* dan Hybrid. Terdapat beberapa teori / model implementasi kebijakan yang sering digunakan, yang dikembangkan dalam tiga pendekatan tersebut. Dalam pendekatan *top bottom*, model yang dikembangkan antara lain model yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle (1980), teori yang dikemukakan oleh Van Meter & Van Horn (1975), model Mazmanian & Sabatier (1983), dan model George Edward III.

Sedangkan dalam pendekatan *bottom up*, model yang dikembangkan antara lain model yang dikemukakan oleh Elmore (1985). Menyikapi model model pada pendekatan top down dan *bottom up,* pada pendekatan *hybrid* dikembangkan model model sistetis diantaranya model Goggin et al. (1990), Majone and Wildavsky (1978) dan model Ripley and Franklin (1982).

Pada penelitian ini mengadaptasi model MSN-*Approach* sebagai dasar teori, yang merupakan salah satu model yang menganut pendekatan hybrid. Pendekatan MSN (*Mentality, system, and* *Networking*) dalam implementasi kebijakan pertama kali dikemukakan oleh Kadji (2015) dalam bukunya yang berjudul Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. Kadji (2015:87) mengemukakan bahwa setiap produk kebijakan yang akan diimplementasikan, bermuara pada tiga dimensi *policy of stakeholders* atau pihak yang berkepentingan dengan kebijakan, yaitu: *Government, Private Sector*, dan *Civil Society*.

**Pendidikan Karakter**

Menurut Raharjo sebagaimana dikutip oleh Zubaedi (2011:16), “pendidikan karakter sebagai suatu proses pendidikan secara holistis yang menghubungkan dimensi moral dengan ranah sosial dalam kehidupan peserta didik sebagai fondasi bagi terbentuknya generasi yang berkualitas yang mampu hidup mandiri dan memiliki prinsip suatu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Thomas Lickona (1991), pendidikan karakter adalah pendidikan untuk membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang yaitu tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, kerja keras dan sebagainya. Dalam hubungannya dengan pendidikan, pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, yang bertujuan mengembangkan kemampuan siswa untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara kebaikan.

Fungsi pendidikan karakter sebagaimana dikutip dari Akhmad Fikir dalam Mahmud (2013:104), adalah:

**1)** Pengembangan potensi dasar peserta didik agar berhati, berpikiran, dan berperilaku baik

2) Memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur untuk menjadi bangsa yang bermartabat

3) Untuk menyaring budaya yang negatif dan menyerap budaya yang sesuai dengan nilai budaya dan karakter bangsa untuk meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia.

Sedangkan fungsi pendidikan karakter menurut Kementerian Pendidikan Nasional adalah:

**1)** Pengembangan potensi dasar, agar ”berhati baik, berpikiran baik dan berperilaku baik

2) Perbaikan perilaku yang kurang baik dan penguatan perilaku yang sudah baik

3) Penyaring budaya yang kurang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila

Konsep adanya pendidikan karakter pada dasarnya berusaha mewujudkan peserta didik atau manusia berkarakter (akhlak mulia). Mendiknas (2011: 6) mengemukakan bahwa pemebentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Di dalam pasal 1 UU Sisdiknas tahun 2003 juga telah disebutkan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan dan akhlak mulia. Adapun tujuan dari pendidikan karakter yang sesungguhnya jika dihubungkan dengan falsafah Negara Republik Indonesia adalah mengembangkan karakter peserta didik agar mampu mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila.

**3. METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif, menggunakan pendekatan *Mix Method* (Penelitian Campuran). Sesuai dengan konteks masalah yang diteliti dan rumusan masalah penelitian yang diajukan, maka jenis metode penelitian campuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Sequential Exploratory,* dimana pada tahap pertama menggunakan metode kualitatif dan pada tahap kedua menggunakan metode kuantitatif.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Sekolah Menegah Kejuruan di Kabupaten Serang, Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Serang Cilegon sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan satuan pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan di Kabupaten Serang. Pada penelitian ini **ditentukan** objek penelitian dengan menekankan teknik *purposive sampling* dan *snowball* sebagai berikut:

Tabel.1

Tabel Narasumber

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Unit Analisis** | **Informan** | **Jumlah** |
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten | * Kepala Dinas (Key informan)
* Kepala Bidang Pembinaan SMK
 | 11 |
| 2 | Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | * Kepala KCD Seragon
* Kasubag KCD Seragon
 | 11 |
| 3 | Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Serang (sample)1. SMKN 1 Ciruas
2. SMKN 1 Keragilan
3. SMKN 1 Anyer
4. SMKN 1 Cinangka
 | * Kepala Sekolah
* Wakasek Kurikulum
* Guru
* Komite Sekolah
 | 4444 |
| **Jumlah** | **20** |

Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan pendekatan yang dikembangkan oleh Miles & Huberman (1992), dengan mempertimbanngkan berbagai faktor terutama terkait masalah teknis dan persyaratan.

Untuk menentukan strategi implementasi, tahap selanjutnya peneliti menggunakan analisis SWOT. Dengan hasil penelitian yang telah didapat melalui pendekatan kualitatif, dan diperkuat dengan hasil observasi, maka akan didapatkan informasi yang luas dan mendalam terkait dengan implementasi kebijakan pengembangan pendidikan vokasi pada SMK berbasis pendidikan karakter di Kabupaten Serang. Data tersebut dikumpulkan, diolah, dan dianalisis secara deskriptif dengan mengadopsi dan mengadaptasi model analisis SWOT yang merupakan analisis kualitatif dengan mengkaji factor-faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari *strengths* (kekuatan atau potensi) dan *weaknesses* (kelemahan dan kendala) sedangkan faktor eksternal dalam hal ini adalah *opportunities* (peluang) dan *treaths* (ancaman).

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Implementasi Kebijakan pengembangan pendidikan vokasi berbasis Pendidikan karakter di Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Serang**

Dinas Pendidikan Provinsi Banten merujuk pada kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional mengembangkan *grand design* pendidikan karakter untuk setiap jalur, jenjang, dan jenis satuan pendidikan. *Grand design* menjadi rujukan konseptual dan operasional pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian pada setiap jalur dan jenjang pendidikan. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial-kultural tersebut dikelompokan dalam:

* 1. Olah Hati *(Spiritual and emotional development)*
	2. Olah Pikir *(intellectual development)*
	3. Olah Raga dan Kinestetik *(Physical and kinestetic development)*
	4. Olah Rasa dan Karsa *(Affective and Creativity development)*

Kemudian dalam standar kompetensi lulusan sekolah terdapat 21 karakter, yakni: mengamalkan ajaran agama, memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri, percaya diri, taat aturan sosial, memahami keragaman agama dan sosial-budaya, rasa ingin tahu *(curiosity),* mampu berpikir produktif, mandiri, mampu menganalisis dan memecahkan masalah kehidupan, mampu mendeskripsikan gejala alam dan sosial, memanfaatkan lingkungan secara bertanggung-jawab, menerapkan nilai-nilai kebersamaan, menghargai senibudaya nasional, mampu berkarya, bersih dan sehat, berkomunikasi efektif dan santun, memahami hak dan kewajiban, gemar membaca dan menulis, berbahasa Indonesia secara baik dan benar serta berbahasa Inggris, mempunyai pengetahuan dasar untuk studi lanjutan, dan memiliki jiwa kewirausahaan.

Pendidikan karakter dalam lingkungan pendidikan kejuruan memiliki ke-khas-an sesuai dengan masing masing jurusan yang dipilih oleh siswa. Karakter yang harus dibentuk pada siswa didik SMK sesuai dengan bidang keahlian adalah sebagai berikut:

* + - 1. Bidang Teknologi dan Rekayasa

Siswa SMK di bidang keahlian teknologi dan rekayasa harus memiliki karakter tekun, berhati-hati, dan bergaransi.

* + - 1. Bidang Energi dan Pertambangan

Karakter kerja yang dibutuhkan adalah: tekun, teliti, hati-hati, dan berjiwa petualang.

* + - 1. Bidang Teknologi Informasi & Komunikasi

Karakter kerja khas yang perlu dikembangkan adalah: Tekun, teliti, inovatif, dan bergaransi.

* + - 1. Bidang Agribisnis & Agroteknologi

Bidang ini memerlukan karakter kerja khas yang perlu dikembangkan yaitu: Kreatif, inovatif, packing skill, dan sales skill.

* + - 1. Bidang Kesehatan & Pekerja Sosial

Sebagai bidang yang mengandalkan kepekaan dan kepedulian dalam melayani pasien dan berhubungan dengan nyawa seseorang maka karakter kerja khas yang perlu diterapkan siswa yang memilih bidang keahlian kesehatan dan pekerja sosial adalah carring (peduli dengan penuh empati), sabar (tabah, tangguh), dan hati-hati

* + - 1. Bidang Kemaritiman

Karakter kerja khas yang perlu diterapkan pada siswa yang memilih bidang keahlian kemaritiman adalah pandai berenang, hati-hati, dan berjiwa petualang.

* + - 1. Bidang Bisnis & Manajemen

Karakter kerja khas yang perlu diterapkan pada siswa yang memilih bidang keahlian bisnis dan manajemen adalah berpenampilan menarik, gesit, teliti, dan memiliki *sales skill.*

* + - 1. Bidang Pariwisata

Karakter kerja khas yang perlu diterapkan pada siswa yang memilih bidang keahlian pariwisata adalah berpenampilan menarik, memiliki communication skill, dan percaya diri

* + - 1. Bidang Seni dan Industri Kreatif

Karakter kerja khas yang perlu diterapkan pada siswa yang memilih bidang keahlian seni dan industri kreatif adalah berjiwa seni, akurat, teliti, dan kreatif

Satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Serang melaksanakan konsep pengembangan pendidikan vokasi dengan menggunakan pendekatan *broad based curriculum* (kurikulum berbasis luas) sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Pendekatan *broad based curriculum* (kurikulum berbasis luas) ini mempersyaratkan adanya ekosistem pendidikan yang baik, yaitu integrasi dan sinergi tiga lingkungan belajar, yakni keluarga, sekolah dan masyarakat. Upaya integrasi inilah yang mendasari penerapan sistem zonasi pendidikan saat ini. Namun dalam pelaksanaannya, sinergi yang diharapkan belum diselenggarakan dengan maksimal. Hal ini diketahui dari hasil observasi dan interview dengan informan yang menyatakan sekolah, keluarga dan masyarakat masih terdapat gap yang menyebabkan komunikasi dan pemahaman tentang pendidikan karakter yang seharusnya dapat diupayakan secara terintegrasi oleh tiga lingkungan pendidikan tersebut, masih sangat terkendala dan belum menyentuh keberhasilan.

Peraturan Presiden nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter menyebutkan Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Berdasarkan Perpres 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Kejuruan dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan interakulikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler. Kegiatan intrakulikuler, ekstrakulikuler dan kokulikuler pada Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Serang dimasukan dalam proses pembelajaran di kelas maupundi luar kelas dengan selalu ditanamkan nilai-nilai karakter utama program penguatan pendidikan karakter yang bersumber dari pancasila yaitu religius, nasionalis, mandiri, integritas, dan kegotongroyongan.

Kegiatan intrakulikuler pada SMK sample dilakukan dengan kegiatan pembiasaan yang terprogram seperti upacara bendera. Beberapa sekolah juga menerapkan penguatan budaya bangsa dengan pengenalan dan pembiasaan untuk menyanyikan lagu daerah Serang, walaupun tidak semua sekolah melaksanakannya. Sementara itu kegiatan kokulikuler pada Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Serang dilakukan dengan kegiatan literasi sebagai menumbuhkan minat baca terhadap siswa serta mendapatkan wawasan yang global sebelum memasuki pembelajaran. Kegiatan Ekstrakurikuler diselenggarakan untuk meningkatkan potensi minat dan bakat terhadap siswa SMK. Setiap SMK menyelenggarakan kegiatan ekstrakulikuler dengan keragaman jenis kegiatan yang sama. Salah satu sekolah sample yakni SMK Negeri 1 Cinangka, menyelenggarakan ekstrakulikuler dengan cabang Futsal, PKS (Patroli Keamanan Sekolah), PIK R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja), Paskibra (Pasukan Pengibar Bendera), Pecinta Alam, Adiwiyata, OSIS, Pramuka, Karate, Pasentra, Rohis, Komputer.

Salah satu konsep pendidikan karakter yang diselenggarakan oleh unit Sekolah Menengah Kejuruan adalah dengan bekerjasama dengan Pusat Pendidikan Karakter (PUSPEKA) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pusat Pendidikan Karakter (PUSPEKA) merupakan salah satu unit organisasi organisasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang dibentuk sesuai dengan Permendikbudristek No. 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pusat Pendidikan Karakter (PUSPEKA) memiliki Visi mendukung Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya **Profil Pelajar Pancasila** yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong-royong, dan berkebinekaan global.

Semangat penguatan karakter siswa SMK ditangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 tahun 2017 dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekoah Menengah Kejuruan. Kedua kebijakan ini juga diterjemahkan melalui gerakan, yang dikenal dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Adapun konsep dasar Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1

Konsep Dasar Penguatan Pendidikan Karakter



Sumber: Kemendikbud RI (2016)

Dalamp pelaksanaannyNetwork Approacha, penguatan pendidikan karakter pada SMK di Provinsi Banten, terletak pada struktur program, struktur kurikulum dan struktur kegiatan praktis. Struktur program berfokus pada jenjang dan kelas, ekosistem Sekolah, dan penguatan kapasitas guru. Struktur kurikulum berfokus pada kegiatan Intra-kurikuler, ekstra kulikuler kokurikuler dan non- kurikuler.sedangkan struktur kegiatan praktis difokuspan pada kegiatan Pembentukan Karakter dilingkungan sekolah berdasarkan 4 dimensi pengolahan karakter Ki Hadjar Dewantara yakni Olah pikir, Olah hati, Olah rasa/karsa dan Olah raga.

Dalam implementasinya pada Sekolah Menengah Kejuruan, fokus penguatan pendidikan karakter diselaraskan dengan tujuan pendidikan vokasi pada SMK yaitu melahirkan lulusan yang siap bekerja dan memasuki dunia usaha, sehingga setiap program kegiatan ditujukan untuk membentuk manusia yang berkarakter, tangguh, disiplin, siap menghadapi persaingan dunia kerja.

**Faktor faktor yang Menyebabkan Implementasi Kebijakan pengembangan pendidikan vokasi berbasis Pendidikan karakter di Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Serang Tidak Efektif**

Faktor faktor Implementasi kebijakan pengembangan pendidikan vokasi berbasis *Pendidikan karakter* di Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Serang di analisis menggunakan model implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Kadji (2008) dengan tiga pendekatan, yakni pendekatan mental, pendekatan sistem dan pendekatan jaringan. (MSN *Approach)*

1. Pendekatan Mental / *Mentality Approach*

Sikap dan mental para aktor kebijakan dalam melaksanakan sebuah program merupakan *penentu* keberhasilan implementasi kebijakan. Para pelaksana kebijakan yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda kebijakan publik. Indikator yang menjadi dasar pengukuran analisis sikap mental pada penelitian ini adalah pada sikap spiritual dan sikap sosial. Tuntutan tanggung jawab berkenaan dengan mentality yaitu sikap para implementor dalam melaksanakan setiap kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, pembinaan sikap pada pendidikan vokasi pada SMK di Provinsi Banten terkait dengan regulasi pembinaan sikap personil pendidikan yang selain diatur oleh regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi, juga oleh lingkungan sekolah sendiri. Monitoring dan evaluasi terhadap sikap disiplin pelaksana kebijakan juga diupayakan oleh masing masing pimpinan sekolah. Hasil wawancara dengan informan menunjukan bahwa mental para implementor dapat di lihat dari bentuk tanggung jawab dalam menjalankan program yang terlihat dari kemampuan pengelolaan waktu dengan model prosedur pelaksanaan yang di susun secara matang. Kebijakan publik ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang acak. Sehingga dapat dikatakan, kebijakan publik ini memiliki tujuan yang telah terarah sebelumnya.

Pelaksana implementasi khususnya pihak sekolah memiliki peran yang cukup penting dalam menularkan sikap spiritual dalam kebijakan pengembangan pendidikan vokasi. Sikap spirtual pelaku kebijakan dalam pengembangan pendidikan vokasi dalam faktor sikap spiritual telah baik, sehingga menjadi pendukung keberhasilan pembentukan karakter siswa dalam rangka membangun pendidikan karakter pada siswa SMK di Kabupaten Serang.

Sikap sosial objek dan pelaku kebijakan dalam pengembangan pendidikan vokasi dalam faktor sikap sosial telah diterapkan dengan baik, sehingga menjadi pendukung keberhasilan pembentukan karakter siswa dalam rangka membangun pendidikan karakter pada siswa SMK di Kabupaten Serang.

Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan. Sedangkan secara negatif kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun, padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.

Penerapan perilaku sesuai dengan pernyataan tersebut ditemukan banyak kendala dan kurang dapat terukur dengan pasti. Dari hasil wawancara dapat di analisis bahwa perilaku pemerintah dalam pengembangan pendidikan vokasi berbasis *pendidikan karakter* pada Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Serang telah diterapkan dengan konsisten walau dengan berbagai hambatan. Pengembangan pendidikan vokasi berbasis *pendidikan karakter* menuntut dukungan perilaku dari berbagai pihak yang terlibat, karena salah satu yang mempengaruhi karakter adalah teladan dan perilaku sekitar yang dilihat oleh siswa.

Pemerintah Provinsi Banten dalam menjalankan pengembangan pendidikan vokasi juga mengarah pada bagaimana membina mental pelajar agar semakin semangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar disekolah dan secara mental merasa mampu dalam menghadapi persaingan. Hal ini mengarah kepada penyediaan infrastruktur yang ada disekolah yang membuat para pelajar merasa nyaman dan segala kebutuhan pelajar dapat terpenuhi, sesuai dengan kebutuhan industri di dunia kerja nanti.

1. Pendekatan Sistem / *System Approach*

Dalam penelitian ini pendekatan sistem implementasi pengembangan pendidikan vokasi berbasis *pendidikan karakter* pada Sekolah Menengah Kejuruan diukur melalui beberapa indikator, yakni sistem regulasi, sistem nilai budaya dan struktur & fungsi organisasi.

Pelaksanaan pengembangan pendidikan vokasi di Kabupaten Serang cukup baik namun belum terstruktur karena dalam implementasinya belum diatur dengan regulasi yang lebih detail dan menyeluruh. kebijakan pengembangan pendidikan vokasi berbasis *pendidikan karakter* berjalan di Kabupaten Serang dengan landasan Perpres Nomor 87 tahun 2017, sejauh ini telah berjalan dengan cukup baik namun karena tidak terdapat regulasi khusus pada tingkat kabupaten dan khusus jenjang Sekolah Menengah Kejuruan, maka pelaksanaannya kurang maksimal menyentuh kebutuhan pendidikan vokasi.

Pemerintah dalam membuat program terlebih dulu mengangkat sebuah fokus yang menjadi permasalahan bagi masyarakat. Dimulai dari input yaitu langkah awal yang mesti ditempuh dalam pengembangan pendidikan vokasi berbasis *pendidikan karakter*. Selanjutnya proses bagaimana penempatan kebijakan sehingga dapat menyentuh seluruh lapisan yang menjadi sasaran dan output yang berkaitan dengan bagaimana lulusan SMK tidak lagi kesulitan dalam memasuki dunia kerja.

Pelaksanaan pengembangan pendidikan vokasi berbasis *pendidikan karakter* benar-benar melibatkan seluruh *stakeholder* pendidikan Vokasi. Terlebih kepada sistem regulasi yang secara keseluruhan mengatur terkait program pengembangan pendidikan vokasi di Kabupaten Serang.

1. Pendekatan Jaringan / *Network Approach*

Dalam penelitian ini pendekatan jejaring kerjasama implementasi pengembangan pendidikan vokasi berbasis *pendidikan karakter* pada Sekolah Menengah Kejuruan diukur melalui beberapa indikator, yakni kemitraan strategis, sinergitas dan simbiosis mutualisme.

Pelaksanaan pengembangan pendidikan vokasi berbasis *pendidikan karakter* pada Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Serang tidak terlepas dari kerjasama semua pihak, dinas pendidikan Provinsi Banten mengakui keberhasilan utama adalah peran pelaksana kebijakan, pihak swasta dan masyarakat yang dapat memahami secara keseluruhan sistem dalam pelaksanaan pengembangan pendidikan vokasi berbasis *pendidikan karakter* pada Sekolah Menengah Kejuruan sehingga dalam proses pelaksanaannya tidak mengalami kendala yang cukup berarti.

keberhasilan pengembangan pendidikan vokasi berbasis *pendidikan karakter* pada Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Serang merupakan hasil dari kerjasama pemerintah dan masyarakat yang sangat mendukung pelaksanaan pengembangan pendidikan vokasi berbasis *pendidikan karakter* pada Sekolah Menengah Kejuruan, dengan demikian pelaksanaan kebijakan tersebut menjadi prioritas dalam pemerintahan Kabupaten Serang.

Kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas yang dideskripsikan dalam bentuk sub sistem: Aspek kelembagaan, Kebijakan dan penganggaran program, Sumber daya manusia, data dan informasi, dan strategi pembiayaan terhadap kebijakan dan program.

Hubungan kerjasama dalam pelaksanaan pengembangan pendidikan vokasi berbasis *pendidikan karakter* pada Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Serang tidak terlepas dari kerjasama antar instansi dalam aspek keterbukaan. Mulai dari proses perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan yang melibatkan semua *stakeholder* yang berkepentingan dalam mendukung terlaksananya pendidikan vokasi berbasis *pendidikan karakter* pada Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Serang. Proses *networking* dalam pelaksanaan pendidikan vokasi berbasis *pendidikan karakter* pada Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Serang mengarah kepada tujuan bersama demi meningkatkan kualitas lulusan pendidikan vokasi di Kabupaten Serang. Pengembangan sumber daya manusia kedepannya akan sangat menentukan masa depan industri di Kabupaten Serang.

Hasil wawancara dengan informasn menunjukan relasi yang di bangun terkait *networking* dalam pembangunan pendidikan vokasi berbasis *pendidikan karakter* di Kabupaten Serang lebih kepada saling berbagi informasi pada kebutuhan industri akan sikap dan mental siswa untuk dapat dimaksimalkan oleh sekolah, sehingga pelaksanaan pendidikan karakter tersebut tepat sasaran.

Banyak tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan saat ini, salah satunya ialah bagian kemitraan sangat berperan dalam peningkatan mutu pendidikan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka sekolah harus menjalin mitra yang baik dengan masyarakat luas. Dalam pelaksanaan pendidikan, dibutuhkan berbagai elemen yang sangat penting yang dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Salah satu elemen yang penting dan dinilai dapat menentukan keberhasilan tujuan pendidikan adalah peran lembaga pendidikan dalam menjalin kerjasama.

Jejaring kerjasama dalam mendukung kebijakan pendidikan vokasi berbasis *pendidikan karakter* di Kabupaten Serang harus melibatkan semua *stakeholder* yang berperan dalam implementasi program tersebut. Dinas pendidikan Provinsi Banten dalam upayanya mengoptimalkan pengembangan pendidikan vokasi berbasis pendidikan karakter maka di bentuklah kegiatan ekstrakurikuler yang terstrukture yang dimana isi kegiatanya harus relevan dengan kurikulum pendidikan karakter.

Relasi yang baik antara pembuat kebijakan, swasta dan masyarakat tentu menjamin kesuksesan sebuah kebijakan yang dibuat. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mentransparansikan segala bentuk program yang dibuat agar masyarakat dapat memahami dan sebuah kebijakan dapat berjalan maksimal. Swasta mempunyai tanggungjawab untuk membagi informasi terkait kebutuhan industri yang harus disiapkan oleh sekolah, dan masyarakat mempunyai tanggungjawab untuk menjadi kontrol dalam kebijakan.

**Strategi Implementasi Kebijakan pengembangan pendidikan vokasi berbasis Pendidikan karakter yang Ideal di Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Serang**

Sebelum menentukan strategi yang efektif dalam implementasi kebijakan pengembangan pendidikan vokasi berbasis *Pendidikan karakter* di Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Serang, maka langkah awal yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menganalisis faktor internal dan faktor eksternal strategi implementasi kebijakan pengembangan pendidikan vokasi berbasis *Pendidikan karakter* di Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Serang melalui analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Serang.

Berdasar pada hasil pembobotan dan rating yang dilakukan melaui analisis SWOT IFAS dan EFAS, maka dapat diperolah total nilai akhir dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut:

Tabel. 2.

Rekapitulasi Hasil Perhitungan IFAS dan EFAS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Total Nilai** |
| 1 | Faktor Internal* + - 1. Kekuatan *(strength)*
			2. Kelemahan *(Weaknes)*
 | **1,4****1,55** |
| 2 | Faktor Eksternal* + - 1. Peluang *(*Opprotunities*)*
			2. Ancaman *(Threats)*
 | **1,547****0,874** |

Tabel di atas menunjukan bahwa hasil perolehan skor kekuatan lebih besar daripada kelemahan. Begitu juga dengan perolehan skor peluang, lebih besar daripada ancaman. Perolehan hasi perhitungan tersebut kemudian digunakan sebagai acuan pembentukan analsiis SWOT untuk melihat posisi potensi pendidikan vokasi berbasis pendidikan karakter pada Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Serang, yang dituangkan dalam diagram berikut:

Gambar. 2

Diagram Analisis SWOT Pendidikan Vokasi Berbasis pendidikan karakter di Kabupaten Serang

***Opportunities***

***Threath***

***Weakness***

***Strength***

Mendukung Strategi Agresif

Mendukung Strategi Diversifiasi

Mendukung Strategi Defensif

Mendukung Strategi Turn Around

-0,15 : 0,673

**KUADRAN I**

**(S-O)**

**KUADRAN II**

**(S-T)**

**KUADRAN III**

**(W-T)**

**KUADRAN IV**

**(W-O)**

Berdasarkan diagram analisis SWOT di atas menunjukan bahwa kebijakan pendidikan Vokasi Berbasis pendidikan karakter di Kabupaten Serang berada pada kuadran II pada situasi yang menguntungkan namun juga sarat akan ancaman. Strategi yang harus diterapkan dalam kuadran ini adalah mendukung strategi diversifikasi.

Secara teoritik terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan oleh organisasi untuk melakukan strategi diversifikasi, yaitu:

1. Apabila mampu melihat peluang-peluang untuk mengembangkan bisnis ke industri industri yang produk maupun teknologinya dapat melengkapi bisnisnya yang ada saat ini
2. Jika mampu mengoptimalkan semua sumber daya yang ada serta kemampuannya, sehinggakeduanya dapat menjadi aset daya saing yang handal
3. Jika dengan melakukan diversivikasi ke bisnis yang berbeda membuka jalan untuk mengurangi biaya, misalnya melalui *sharing* biaya lintas bisnis dengan mengoptimalkan pemanfaatan semua sumber daya dan kemampuan Pemerintah Daerah.

Gambar.3

Gambar Alur Strategi



Berdasarkan gambar yang disajikan di atas dapat diketahui bahwa masalah masalah yang ditemukan dalam implementasi kebijakan Masalah Kebijakan Pengembangan Pendidikan Vokasi Berbasis Pendidikan Karakter pada Sekolah Menengah Kejuruan dapat diatasi dengan strategi diversifikasi yang dirumuskan melalui analisis SWOT, dimana pemerintah / organisasi dalam kondisi cukup baik namun menghadapi sejumlah tantangan berat, sehingga pemerintah harus memaksimalkan potensi kekuatan yang dimiliki untuk meminimalisir ancaman yang ada diluar kebijakan. Strategi ini akan dapat mengoptimalkan kemampuan kebijakan untuk mengatasi kendala kendala yang menyebabkan ketidakefektifan kebijakan pengembangan pendidikan vokasi berbasis pendidikan karakter.

**5.SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan pengembangan pendidikan vokasi berbasis *pendidikan karakter* pada Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Serang belum terimplementasi dengan efektif.
2. Faktor penghambat yang menyebabkan implementasi kebijakan pengembangan pendidikan vokasi berbasis *pendidikan karakter* pada Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Serang belum efektif, ketidakefektifan tersebut ditemukan pada implementasi kebijakan melalui tiga pendekatan yakni pendakatan *mentality, system* dan *network.*
3. Strategi yang paling tepat untuk meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan pengembangan pendidikan vokasi berbasis *pendidikan karakter* pada Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Serang adalah dengan strategi diversifikasi. Salah satunya adalah dengan menyeenggarakan kolaborasi dan kerjasama dengan dunia industri untuk menekan ancaman eksternal yang ada, serta memaksimalkan kekuatan SMK sebagai unit pendidikan terbesar di Kabupaten Serang

**6. DAFTAR PUSTAKA**

Agustian, Ary Ginanjar. 2001. *Rahasia sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan* Spiritual *ESQ: Emotional Spiritual Quotient Berdasarkan 6 Rukun Iman dan Rukun Islam*. Jakarta: Arga Wijaya Persada.

Agustino, Leo (2008), *Dasar Dasar Kebijakan Publik***,** Alfabet, Bandung

Ajigo, I., Asuquo, E.D., & Oliver, A.C. (2018). Quality Implementation of Technical and Vocational Education and Entrepreneurial Skill Acquisition for Technology And Economic Development In Nigeria.

Cresswell, John. W. (2012) *Resarch Design: Qualitatif and Quantitative Approach*. California: Sage Publication

David, Fred R. 2012. *Manajemen Strategi Konsep. Formulasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan*.Jakarta: Salemba Empat

Dunn, William (1981). *Public Policy Analisys****,*** London: Prentice-Hall, Inc; Englewood Clifts.

Edward III, George C (1980). *Implementing Public Policy****.*** Washington Congresional Quarterly. Inc

Fautley, M. (2018). The implications of evaluation and educational policy reforms on English secondary school music education. Arts Education Policy Review, 1–9. doi:10.1080/10632913.2018.1532369

Grindle, Merilee. S, (ed) (1989), *Politics and Apolicy Implementation in the Third World****.*** New Jersey:Princetown University Press.

Hair, J.F., Black, W.C., Babim, B.J., Anderson, R.E., & Tatham, R.L. (2006). *Multivariate Data Analysis, 6th ed*. Pearson International, New York

Henrizal, Erick M, Satibi, Iwan, (2019) *Analisis Kebijakan Publik dalam Perspektif teoritik dan empirik*, Bandung: LaGoods Publishing.

Islamy, Irfan. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik. Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas.* Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press.

Kooten, J, 1991. Strategic Management in Public and Nonprofit Organizations. New York: Praeger Publishers

Kuswana, Sunaryo, wowo, 2013. *Dasar-dasar Pendidikan Vokasi & Kejuruan.* Bandung: Alfabeta.

Leman. 2007. Memahami Pendidikan karakter. Anima (Indonesian Psychological Journal).

Mariah, S., & Sugandi, M. (2013). Kesenjangan Soft Skills Luusan SMK dengan Kebutuhan Kerja di Industri. Sociology of Work: An Encyclopedia, 1–26. https://doi.org/10.4135/9781452276199.n287

Moleong, Lexy J., 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung*: Remaja Rosdakarya.

Mulyasa, E. 2012. *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi dan Implementasi*. Bandung: penerbit PT Remaja Rosdakarya.

Nashori. 2007. Pelatihan Adversity Intellegence untuk Meningkatkan Kebermaknaan Hidup Remaja Panti Asuhan. Jurnal Psikologi No.23 Thn XII Januari 2007.

Nugroho, D. Riant. 2008. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. PT Alex Media Komputindo: Jakarta

Rangkuti, Freddy. 2009. *Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication.* Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama

Rangkuti,Freddy. 2013. *Analisis SWOT : Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama

Robinson, Pearce. 1997. *Manajemen Stratejik Formulasi, Implementasi dan Pengendalian* Jilid 1, Jakarta : Binarupa Aksara.

Slamet, P. H. (2009). Peran pendidikan vokasi dalam pembangunan ekonomi. Cakrawala Pendidikan, xxx(2), 189–203.

Stoltz, Paul G. 2000. *Pendidikan karakter; Mengubah Hambatan Menjadi Peluang*. Jakarta: Grasindo.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta

Suryadi.2010. “Permasalahan Dan Alternatif Kebijakan Peningkatan Relevansi Pendidikan(Studi Relevansi Pendidikan Kerjasama UPI dengan balitbang Kemendiknas” .http://file.upi.edu/Direktori/PROCEEDING/ Seminar\_Internas.NFE

Thoha, Miftah, 2005, Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Wahab, Solichin Abdul. (2005). Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta:PT. Bumi Aksara

Wangsadinata, Wiratman dan G. Suprayitno. 2008. *Roosseno: Jembatan dan* Menjebatani. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Wheelen, Thomas L dan Hungger, J. Davis. 2012. *Strategic Management and business Policy.* Singapore: Addison Wessley.

White, L. D. (1938). GULICK, LUTHER, and L. URWICK (Eds.). Papers on the Science of Administration. Pp. vii, 195. New York: Institute of Public Administration, 1937. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 197(1), 284–285. doi:10.1177/000271623819700157

Widodo, Joko. 2007. Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing.

Winarno, Budi, 2002, Teori Dan Proses Kebijakan Publik, Yogjakarta: Madia Pressindo

Zhang, Xinqin. 2019. A Comparative Study on Implementation of Vocational Education Policies in Beijing and Manila. International Conference on Sports, Arts, Education and Management. Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/saeme-18.2018.67